

PEMBUNUHAN SOLEIMANI DAN ESKALASI KONFLIK AS-IRAN

Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Eskalasi konflik AS-Iran meningkat kembali akibat tewasnya Mayor Jenderal Soleimani, tokoh militer Iran yang amat dihormati dan sekaligus ditakuti AS dan koalisi Barat dan Sunni pendukungnya di Timur Tengah. Aksi saling ancam dan balas serangan telah dilakukan, sehingga membawa dampak langsung dan tidak langsung atau juga sampingan, baik secara politik, ekonomi maupun keamanan bagi kawasan dan di tingkat global, berupa naiknya harga minyak, jatuhnya harga saham, dan meningkatnya instabilitas keamanan. Solusi yang bersifat terbatas telah diperlihatkan, namun eskalasi konflik belum bisa dikatakan berhenti. Tulisan ini membahas pemicu eskalasi konflik yang cepat itu, dampak secara luas yang diakibatkannya, serta langkah solusi yang telah diambil. Kajian memperlihatkan, baik pemicu maupun dampak konflik, bersumber dari kepemimpinan Trump yang bermasalah, lemah dan kacau, sedangkan solusi konflik yang diupayakan, belum efektif.

Pendahuluan

Konflik Amerika Serikat (AS)-Iran memasuki fase baru dengan eskalasi yang tinggi, dengan dampak yang besar bagi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dunia, pasca-serangan pesawat nirawak, *drone* AS yang menewaskan Mayor Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Al-Quds, sesaat ia baru tiba di Baghdad pada 3 Januari 2020. Serangan langsung AS yang menyebabkan kematian petinggi militer yang amat populer dan disegani di Iran,

dan Syiah di Timur-Tengah itu, mengejutkan dunia, tidak hanya bagi pemerintah Iran yang sedang dilanda kemarahan akibat serangan terhadap kelompok milisi Kataib Hezbollah dan pemimpinnya Abu Mahdi al-Muhandis, tetapi juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara berpengaruh di kawasan.

Soleimani dan Al-Quds dikenal dengan popularitasnya dalam menggaungkan perlawanan keras terhadap AS, Israel dan koalisi pendukung, serta berbagai kepentingan mereka di Timur-



Tengah dan Afrika Utara. Seperti halnya hubungan Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, keterkaitan Pasukan Pengawal Al-Quds dan Kataib Hezbollah begitu erat dan berbahaya bagi kepentingan AS dan koalisi pendukungnya, terutama Israel, Saudi Arabia, Kuwait dan negara teluk lain.

Figur Soleimani selama ini amat disegani di Iran dan Timur-Tengah, dan telah membuatnya muncul sebagai tokoh militer yang dibanggakan bagi rakyat Iran dan kaum Syiah di kawasan (Dikarma, 2020: 8). Sedangkan oleh AS dan koalisi pendukungnya, terlebih Israel dan Arab Saudi, begitu diwaspadai dan diincar setelah sengketa nuklir Iran kian memanas. Tewasnya Soleimani memicu kemarahan yang memuncak terhadap AS, apalagi setelah diungkapkan secara resmi bahwa perintah serangan datang dari Presiden AS, Donald Trump.

Presiden AS belakangan semakin terseret wacana saling ancam dengan Presiden Iran, untuk menunjukkan kekuatan sebagai pemimpin negara yang kuat. Eskalasi konflik AS-Iran yang tengah mencapai klimaksnya ini sangat berbahaya, dan jauh lebih rentan menciptakan perang terbuka daripada situasi sebelumnya. Sikap rakyat AS terbelah antara yang menentang, dari kalangan perempuan, keluarga-keluarga dan aktivis HAM, dan yang mendukung langkah presiden mereka dari kalangan veteran, yang menilai Iran sebagai sumber instabilitas di Irak dan Timur-Tengah belakangan ini (Oppel Jr and Bogel-Burroughs, 2010: 4). Tulisan ini membahas

dampak kematian Soleimani dan langkah dunia untuk mencegah berlanjutnya perang terbuka AS-Iran, yang dapat memicu perang dunia ketiga.

Implikasi Politik

Kematian Soleimani menjadi ajang saling tuding kesalahan siapa yang memicu perang terbuka. Iran menuduh AS melakukan aksi terorisme susulan atas 3 basis Kataib Hezbollah di Idlib, Irak, yang menyebabkan tewasnya 4 komandan dan sekitar 25 pendukung mereka, di perbatasan Irak-Suriah (*Republika*, 31 Desember 2020, dan *Suara Pembaruan*, 2 Januari 2020). AS membantah dan menyatakan kelompok itu sebagai teroris yang mengancam stabilitas regional dan pasukan koalisi pimpinan AS. Sebagai respons atas serangan AS, milisi Hashed al-Shaabi mendemo Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Baghdad pada 30 Desember 2019 sampai 2 Januari 2020. Mitra milisi mereka, Kataib Hezbollah, secara militan menyerang dan membakar bagian depan Kedubes, membangkitkan trauma atas kasus serupa di Kedubes AS di Libya dan Teheran beberapa tahun silam.

Selain meminta bantuan pemerintah dan militer Irak untuk menindak, AS melancarkan operasi pembunuhan atas Soleimani, yang dianggap sebagai perencana dan penggerak operasi serangan terorisme atas Kedubes AS di Irak. Keputusan ini dinilai efektif menghentikan ancaman atas Kedubes, para diplomat, dan eksistensi kepentingan AS di Irak. Kaum Syiah di Irak telah mengultimatum AS untuk segera

pergi dari Irak, langkah yang merendahkan supremasi AS. Menghadapi provokasi Iran, Trump sulit mengharapkan dukungan Arab yang solid, karena posisi mereka dewasa ini rapuh (*New York Times*, 21 Januari 2020).

Di dalam negeri AS, pro-kontra muncul, baik dari kalangan Partai Demokrat dan Partai Republik, partai pendukung Trump. Mereka menolak perang terbuka walaupun Iran telah dinilai sebagai pangkal persoalan, yang telah memicu eskalasi ketegangan secara drastis. Pasca-serangan balasan Iran ke dua pangkalan militer AS di Irak, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengingatkan bahwa Amerika dan dunia tidak mampu membiayai perang (*Republika*, 9 Januari 2020).

Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang cepat menyadari implikasi globalnya, segera menyerukan pemimpin kedua negara untuk menahan diri semaksimal mungkin sehingga tidak memicu perang terbuka. Para Menlu Uni Eropa (UE) harus menggelar rapat darurat dan mengingatkan aksi kekerasan berbalasan harus dihentikan. Karena keprihatinan besar atas prospek konflik, seruan agar semua pihak yang bertikai menahan diri, terutama pemimpin AS dan Iran, datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia (Dikarma, 2020: 4).

Implikasi Ekonomi

Pasca-tewasnya Soleimani akibat serangan AS, harga minyak dunia langsung melonjak 4% di hari tewasnya Soleimani pada 3 Januari 2020, karena khawatir ancaman pembalasan dari Iran (*Jakarta Post*, 4 Januari 2020). Jika kilang-kilang

minyak dan gas menjadi sasaran dan Selat Hormuz terdampak, perekonomian negara-negara Teluk terganggu, karena kedua energi itu sumber penghasilan mereka.

Pada 9 Januari 2020, di London harga minyak menyentuh 5%, mencapai 75 US\$ per barel. Harga minyak bisa menyentuh 100 US\$ per barel, karena 30% suplai minyak dunia melalui Selat Hormuz, yang bisa ditutup Iran, jika perang berlanjut (*Jakarta Post*, 9 Januari 2020). Efeknya bisa ke Indonesia, karena RI sudah menjadi pengimpor minyak mentah, dan ekspor komoditi RI bisa terganggu, karena perang kian menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Harga saham di Asia jatuh, dengan Nikkei Jepang merosot hingga 2,5% (*ibid*). Harga emas juga naik, yang bisa memicu modal keluar. Defisit perdagangan RI akan membengkak, yang berdampak ke APBN.

Konsekuensi Keamanan

Trump mengulangi *blunder* yang dilakukan George Bush Jr. dengan menginvasi Irak dan menjatuhkan Saddam Hussein, sehingga melemahkan kekuatan Sunni moderat di Timur Tengah. Sebaliknya, kekuatan Sunni konservatif, seperti Al-Qaeda, ISIS dan lain-lain, serta Syiah bangkit dan menguatkan posisi mereka. Sementara, Pasukan Al-Quds pimpinan Soleimani adalah unit khusus dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) yang ditakuti karena mengancam kepentingan AS dan koalisinya di Timur Tengah terkait sengketa nuklir dan pengenaan sanksi-sanksi atas Iran selama ini. Karena aksi-aksi militannya, IRGC dan

Al-Quds, serta milisi Hezbollah, dinyatakan AS sebagai kelompok teroris berbahaya. Sebaliknya, karena berbagai kebijakannya yang merugikan Iran, dengan didukung parlemen, pemimpin Iran mendeklarasikan AS sebagai teroris internasional.

Karena menjadi ajang pertempuran negara lain, Irak menjadi medan *proxy war*, dengan risiko semakin hancur dan menjadi pariah, dari semula sebagai negara Sunni terbesar di Timur Tengah (Gebelly, 2020). Perang terbuka kedua negara menghambat upaya dunia mengeliminasi ISIS dan memberi peluang menyatukan kaum militan di kawasan untuk mengusir AS dan koalisi Barat dari Timur-Tengah, terutama Irak. Selanjutnya, untuk menghindari jatuhnya korban sipil di pihaknya, Pemerintah AS mengeluarkan peringatan kepada warganya, khususnya kontraktor minyak dan gas, dan mengirimkan kembali ribuan pasukan tambahan untuk mengamankan instalasi militer dan kepentingan lainnya. Seruan serupa dibuat Pemerintah Indonesia karena memiliki lebih sejuta warga yang bekerja di Timur Tengah, dengan sekitar 1.500 orang di Iran dan Irak (Kompas, 9 Januari 2020).

Solusi Konflik

Di luar serangan militer, AS tetap mengajukan solusi non-militer lewat pemberlakuan sanksi baru yang lebih berat dan luas pada Iran, dengan menekan UE untuk mendukung keputusannya (Kompas, 17 Januari 2020). Sanksi baru itu berdampak pada industri baja Iran. Sedangkan solusi Iran yang terburu-buru di tengah kemarahan,

yang segera melakukan serangan balasan, telah memicu kesalahan fatal dengan tertembak jatuhnya pesawat sipil Boeing 747 yang tengah menuju Kanada oleh rudal Iran. 'Collateral damage' ini telah berakibat tewasnya 176 penumpang (Koran Tempo, 14 Januari 2020), yang kebanyakan warga sipil Kanada, Iran dan Ukraina, negeri yang tengah berkonflik dengan Rusia, sekutu Iran, akibat respons tidak cermat pihak Iran.

Pemerintah Irak nyatanya tidak berdaya mengeliminasi kontrol pengaruh asing menciptakan stabilitas keamanan domestik. Untuk meredakan konflik, Kongres AS telah mengeluarkan undang-undang yang mengurangi kewenangan Presiden Trump dalam mengambil opsi militer atas Iran. PBB pun hanya bisa menyerukan kedua negara dan pemimpin mereka, pemimpin dunia lain yang belakangan ini terlibat *proxy war* untuk menahan diri dan mengakhiri ego mereka. Adapun Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, telah berinisiatif menengahi, dengan mendekati Pemimpin Iran dan sekutu dekatnya selama ini, AS.

Sayangnya, upaya Indonesia hanya terbatas pada seruan dari Menlu Retno LP Marsudi dan Wapres Ma'aruf Amin. Di PBB pun, sekalipun Indonesia menduduki kursi DK-PBB sebagai Anggota Tidak Tetap, tidak banyak yang bisa diperbuat, yang dapat mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan di lapangan, sebab yang dihadapi adalah AS pemegang hak veto dan juga negara besar lain, yakni Rusia dan China, yang mendukung

Iran dalam *proxy war* selama ini di Timur-Tengah. Solusi lewat 'diplomasi jalur kedua' tidak akan efektif, karena AS bukan anggota *Inter-Parliamentary Union* dan belakangan tidak hadir di forum-forum keparlemenan, baik di tingkat dunia maupun kawasan.

Tidaklah mengherankan, walaupun seruan damai telah disampaikan para pemimpin dunia, ketegangan tidak berkurang. Di pihak lain, Trump telah mengirimkan pasukan baru, bagian dari 'strategi taktis'-nya, sehingga tidak konsisten dengan agenda semula menarik pulang pasukan AS dari Timur-Tengah. Dalam perkembangan yang lebih buruk, di perairan Laut Arab Utara, kapal perang Rusia melakukan provokasi dengan membayang-bayangi dari jarak dekat kapal perusak AS.

Penutup

Serangan atas Soleimani memperlihatkan AS tidak punya strategi besar (*grand strategy*) yang jelas dalam konflik dengan Iran di Timur Tengah. Runtuhnya kekuasaan dan dominasi pengaruh Sunni di kawasan dan kebangkitan Syiah pasca-jatuhnya rezim sekutu AS, Reza Pahlevi yang berkuasa secara otoriter selama beberapa dasawarsa, dan bangkitnya rezim baru di bawah (pengaruh) Khomeini, terus diprovokasi sengketa nuklir Iran yang tidak pernah mencapai titik temu untuk diselesaikan. Sedangkan Trump, terjebak dalam pengambilan keputusan yang bersifat sesaat, kecil dan tampak personal sifatnya. Serangan atas petinggi militer terkemuka Iran itupun tidak kuat alasannya.

Tampaknya, proses pembuatan keputusan yang buruk telah membawa kekacauan di akhirnya, karena yang muncul kemudian adalah kontradiksi dan komunikasi yang membingungkan dari seorang kepala pemerintahan yang telah mengalami defisit kepercayaan. Gaya kepemimpinan Trump dan caranya mengambil keputusan yang tidak tepat terus memberikan dampak negatif. Jika terjadi perang terbuka AS-Iran yang lebih besar, maka hal tersebut akan memberi dampak serius secara politik, ekonomi dan keamanan dunia.

Sebagai kawan dekat, dan negara yang turut dihormati Iran, Indonesia tidak bisa berbuat banyak, karena seteru Iran adalah negara adidaya, AS, yang diharapkan berperan lebih besar dewasa ini dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik bersama-sama dengan China, yang belakangan ini turut mengancam Indonesia dengan klaim *nine dash lines-nya*. Memanfaatkan posisinya sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB bisa saja, tetapi Indonesia akan menghadapi AS serta Rusia dan China, negara-negara besar yang saling berkonflik kepentingan dan masing-masing memiliki hak veto.

Referensi

- Ackerman, Elliot, David French and James Stavridis. 2020. "The Iran Standoff: The 40-Year Conflict", *Time*, 20 Januari 2020, hal. 14-31.
- Baker, Peter. 2020. "Messy process' and 'messy day after". *New York Times*, 9 January 2020, hal. 4.

- Dikarma, Kamran. 2020. "Serangan AS Tewaskan Jenderal Iran," *Republika*, 4 Januari 2020, hal. 6.
- Gebelly, Maya. 2020. "With Pro-Iran Groups at Helm, Iraq Risks becoming Pariah". *Jakarta Post*, 4 Januari 2020, hal. 13.
- Nasr, Vali R. 2020. "Confronting Iran in an Unstable Era," *New York Times*, 21 Januari 2020, hal. 1 dan 11.
- "No, Mr. President, It Matters", *New York Times*, 20 Januari 2020, hal. 8.
- "Oil Prices Soar as US Kills Top Iranian General, Fans War Fears," *Jakarta Post*, 4 Januari 2020, hal. 9.
- Oppel Jr, Richard A. and Nicholas Boggel-Burroughs. 2020. "Iraq Veterans Find Solace in General's Death", *New York Times*, 15 Januari 2020, hal. 4.
- Rahman, Riska. 2020. "US-Iran Row Poses New Threat to RI's Economy." *Jakarta Post*, 9 Januari 2020, hal. 3.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwids-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India" (2018) dan "*Proxi War* di Timur Tengah (2020)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.